

3

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

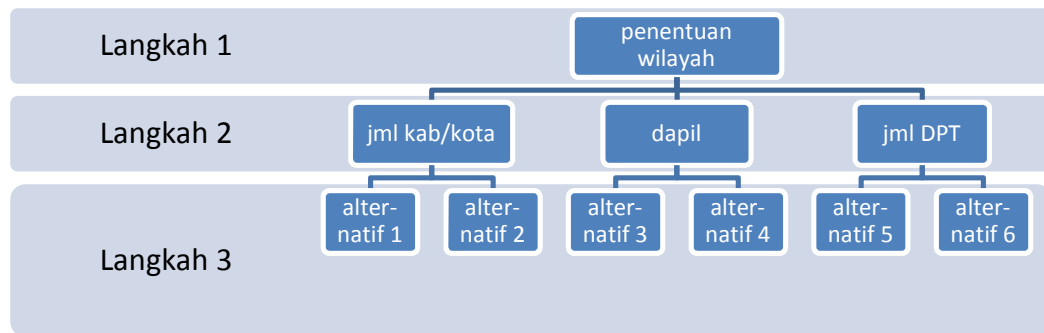
3.1. Desain Penelitian

Untuk membahas permasalahan tatakelola wilayah lembaga penyelenggara pemilu ini penulis/peneliti mempergunakan metode deskriptis-analitis. Dalam satu pengertian ringkas, metode yang dipergunakan ini meliputi apa yang: (1) disebut Sugiyono (2017) sebagai analitis-deskriptis, yakni "...pendekatan yang berfungsi untuk menemukan dan memahami fenomena sentral"; (2) disebut Garnett (2017) sebagai pilihan normatif untuk mengukur kualitas pemilu dengan melihat seberapa baik pelaksanaan pemilu itu ditimbang dengan norma dan standar internasional, seperti yang dituangkan ke dalam kesepakatan atau perjanjian internasional.

Metode deskriptis-analitis itu diterapkan dan digabungkan dengan proses analisis hirarkis (*Analytic Hierarchy Process*) yang berfungsi untuk menimbang beberapa kriteria guna rekonstruksi wilayah KPU sub-nasional. Bertolak dari kebutuhan untuk melakukan rekonstruksi wilayah kerja KPU provinsi, dibutuhkan kriteria-kriteria tertentu untuk menjadi dasar pemilahan dalam rekonstruksi itu. Kriteria-kriteria tersebut, sesudah ditetapkan jenisnya, akan tampak jika masing-masing sesungguhnya memiliki bobot yang berbeda-beda. Dengan demikian dibutuhkan suatu cara untuk membuatnya setara, dengan memanfaatkan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dari Saaty yang secara matematis menyetarakan kriteria-kriteria yang berbeda-beda bobotnya itu sedemikian rupa sehingga operasional.

Metode AHP ini merupakan semacam formula penghitungan matematika sederhana yang ditemukan dan dipopulerkan oleh matematikawan asal Sudan di Pittsburgh, Thomas L. Saaty. AHP ini adalah alat bantu untuk mendukung pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Menurut Saaty (1993), sebagaimana dikuti Muntafa, hirarki diartikan sebagai suatu bentuk representasi dari sebuah permasalahan yang rumit dan kompleks berkelindan ke dalam suatu struktur multilevel, dengan menetapkan level pertama adalah tujuan, diikuti oleh level faktor, kriteria, sub-kriteria, dan seterusnya hingga level terakhir dari alternatif (Munthafa and Mubarak, 2017).

HIRARKI. Kegiatan utama dalam metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) adalah hierarki dari masalah yang akan diselesaikan. Secara umum, penggunaan AHP ini dilakukan dalam dua tahap , yakni: (1) penyusunan hierarki dan (2) evaluasi hierarki. Hierarki di sini dimulai dari tujuan utama, turun ke kriteria dan akhirnya ke alternatif-alternatif yang akan ditetapkan sebagai pilihan. Pada penelitian ini, tujuan utama yang menempati level teratas adalah menemukan pengaturan pengelompokan kabupaten/kota di dalam kelompok KPU sub-nasional, atas dasar: jumlah kabupaten/kota, daerah pemilihan yang terintegrasi, dan jumlah DPT seperti tampak pada Bagan 3.1.



Bagan 3.1. Level Operasi AHP

PEMBANDINGAN KRITERIA. Sebagai langkah selanjutnya dilakukanlah perbandingan kriteria atau penilaian kriteria atau alternatif. Pairwise comparison ini membandingkan secara berpasang-pasangan suatu hal yang boleh dibilang homogen, sehingga yang dibandingkan itu akan lebih mudah, obyektif dan terkendali. Yang harus diingat adalah sebagaimana dinyatakan tersirat oleh Saaty, yang Peneliti rumuskan menjadi satu parafrase sebagai berikut: “Kita bisa membandingkan apel dengan jeruk dengan cara perbandingan bersyarat sedemikian rupa, sehingga hal-hal yang berbeda pun dapat dibandingkan dengan mudah dan dapat dipertanggungjawabkan” (Saaty and Vargas, 2012). Dalam hal ini perbandingannya ditetapkan ke dalam skala dasar yang bermakna kualitatif yang dikuantifikasi seperti Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Skala Dasar Perbandingan Kriteria

| Angka Skala Intensitas Nilai Pentingnya (<i>Intensity of Importance</i>) | Definisi /Keterangan |
|---|---|
| 1 | Tujuan yang satu dengan yang lainnya sama penting |
| 3 | Tujuan yang satu sedikit lebih penting (agak kuat) dibanding tujuan lainnya |
| 5 | Tujuan yang satu sifatnya lebih penting (lebih kuat pentingnya) dibanding tujuan lainnya |
| 7 | Tujuan yang satu sangat penting dibanding tujuan yang lainnya |
| 9 | Tujuan yang satu ekstrim pentingnya dibanding tujuan lainnya |
| 2, 4, 6, 8 | Nilai tengah di antara dua nilai skor penilaian di atas — dipertimbangkan untuk diterapkan manakala <i>judgement</i> di atas cukup persisi. |

Tabel 3.2. Matriks Nilai Kriteria

| | A1 | A2 | An | Jumlah | Prioritas |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------------|
| A1 | A11/a | A12/b | A1n/c | J | J/n |
| A2 | A21/a | A22/b | A2n/c | K | K/n |
| An | An1/a | An2/b | Ann/c | L | L/n |

Mengukur konsistensi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keputusan yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Suatu kriteria dikatakan konsisten jika nilai C1 kurang dari atau sama dengan 10%. Beberapa langkah yang dilakukan dalam mengukur konsistensi, yaitu: Kalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama. Nilai pada kolom kedua dengan prioritas relatif elemen kedua, dan seterusnya.

3.2. Wilayah Penelitian

Mengingat penelitian ini bersifat *desk-study*, maka lokasi penelitian ini dapat memilih di mana pun di Indonesia. Namun penelitian ini memusatkan perhatian hanya pada satu kawasan yang melingkupi 7 (tujuh) provinsi di pulau-pulau Jawa, Madura dan Bali. Pemilihan wilayah ini semata-mata karena pertimbangan praktis; selain juga karena di kawasan ini meliputi lebih separuh penduduk Indonesia maupun warga negara yang memiliki hak pilih.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini terdiri dari pelbagai ragam data, yang kesemuanya merupakan data sekunder, yang diperoleh dari dokumen dan kepustakaan. Ragam data mencakup spektrum yang cukup terbatas, hanya yang dinilai relevan untuk KPU tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota masing-masing menyangkut jumlah kabupaten/kota di masing-masing provinsi di kawasan terpilih, daerah pemilihan (dapil) untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pusat dan data jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada tiap-tiap kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

3.4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan di sini adalah deskriptif-analitis dengan melakukan komparasi, analisis dan pemerian, yang diaplikasikan ke dalam usaha rekonstruksi dengan membuka bangunan lama tatakelola KPU tingkat provinsi demikian rupa. Hasil rekonstruksi diperoleh beberapa skenario, yang merupakan *draft*, dan satu di antaranya dituangkan sebagai skenario yang dianggap memadai sebagai sulih (substitusi) terhadap tatakelola KPU yang lama.

3.5. Unit Analisis

Dalam semua penelitian unit analisis —yakni satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subyek penelitian— perlu ditetapkan agar tidak terjadi kerancuan melakukan kajian. Dengan demikian peneliti terjaga untuk fokus pada cakupan kajiannya. Penelitian ini mengambil unit analisis provinsi dan gugus kabupaten/kota/distrik. Sesuai dengan “visi” penelitian ini, peneliti mencoba keluar dari paradigma kewilayahan administrasi provinsi ini begitu rupa, sehingga unit analisis ini diterapkan secara longgar, namun hal ini dilakukan dengan tanpa menjadi cabar atau hilang fokus.

3.6. Teknik Analisis Data

Data dan atau informasi yang diperoleh dianalisa dikaitkan dengan permasalahan yang ditetapkan, yakni 3 (tiga) butir rumusan yang menunjukkan jalan pikiran kajian ini. Dalam penelitian ini nanti akan diuraikan secara kreatif bagaimana ketiga butir itu dianalisis untuk kemudian ditunjukkan penjabaran ekstrapolatifnya. Pada akhirnya, kesemuanya bermuara kepada solusi yang disarankan selaras dengan teori yang diterapkan di sini.